



## Activity Update

# Pemangku Kepentingan Diskusikan Masa Depan Tatanan Kepelabuhanan di Indonesia

BERDASARKAN UU no. 17/2008 tentang Pelayaran, para pembuat kebijakan dihadapkan pada tantangan yang besar. Undang-Undang mengamanatkan pembentukan Otoritas Pelabuhan untuk mengatur kegiatan operasional pelabuhan komersial yang tugasnya menyangkut pelayaran, navigasi, perlindungan lingkungan maritim, sumber daya manusia, dan subjek-subjek terkait. Namun, secara umum UU menyerahkan tanggung jawab kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut (DJPL) untuk membuat Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) yang akan memberikan pedoman mengenai hal-hal spesifik tentang penerapan sistem pelabuhan modern.

DJPL menanggapi tantangan tersebut dengan menyusun RIPN dengan memanfaatkan bantuan teknis dari Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII). Rancangan RIPN itulah yang menjadi fokus diskusi dalam seminar pada tanggal 13 Desember 2011 di Hotel Nikko di Jakarta, bertema “Masa Depan Pelabuhan Indonesia: Kebijakan Utama dan Rencana Investasi Pelabuhan”

### Investasi dan Infrastruktur

Para pembicara yang menyampaikan presentasi di acara tersebut adalah Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, DJPL, Kemal Heryandri; Dail Umamil Asri, Kepala Sub-direktorat Perhubungan Laut, Bappenas; dan Bambang Eka Cahyana, PT Pelindo I. Pembicara dari IndII adalah Direktur IndII, David Ray, dan konsultan IndII, Paul Kent dan Prof. Sudjanadi. Pembahasan seminar mengarah pada pemisahan fungsi operator dan regulator, mendorong investasi sektor swasta, dan perlunya infrastruktur pelabuhan yang bisa menampung kapal-kapal yang besar. Setelah presentasi, diadakan sesi Tanya-Jawab, yang menyangkut beragam topik, termasuk pariwisata, logistik, dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Seminar ini akan diikuti oleh kegiatan IndII lainnya untuk mensosialisasikan RIPN dan mendapatkan masukan dari pemerintah daerah pada awal tahun 2012. ●

*“Meskipun gagasan yang bagus terdapat dalam UU Pelayaran, tapi itu saja tak cukup. Kami perlu menetapkan perinciannya, mendirikan otoritas pelabuhan, dan sebagainya. Hal-hal ini membutuhkan waktu dan usaha. Diskusi hari ini akan membantu kami bergerak maju.”*

– Kemal Heryandri  
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan  
Direktorat Jendral Perhubungan Laut



Para pembicara lokakarya mendengarkan pertanyaan dari hadirin.

*Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) adalah proyek yang didanai Pemerintah Australia dengan tujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan relevansi, kualitas dan besarnya investasi di bidang infrastruktur.*

